

PAPER TEORI AKUNTANSI

KELOMPOK 5

Anindia Maharani

2413013042

Anggit Yunizar

2413031046

MENGEVALUASI KEBIJAKAN PENGUKURAN (*FAIR VALUE VS HISTORICAL COST*) KEBIJAKAN PENGUKURAN DAN TANTANGANNYA

I. PENDAHULUAN

Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah untuk menyusun laporan yang memberikan informasi berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Oleh karena itu, setiap tim manajemen harus menggerakkan bisnis ke depan dan memastikan keberlangsungan usaha. Perusahaan yang beroperasi di sektor real estat harus mematuhi prinsip akuntansi yang diakui secara umum saat menangani masalah keuangan, namun setiap perusahaan real estat umumnya memiliki prosedur yang berbeda dalam kegiatan usahanya. Perusahaan yang memiliki standar kualitas tinggi perlu mengembangkan strategi kreatif untuk pelaporan keuangan guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan perbandingan laporan keuangan. Standar yang perlu ditingkatkan mencakup pengungkapan informasi mengenai transaksi bernilai tinggi, perancangan laporan keuangan yang lebih mengutamakan penilaian profesional dibandingkan aturan yang sudah tidak relevan, serta penerapan metode penilaian yang berbasis pada biaya dan nilai wajar.

Dalam bidang akuntansi, penilaian merupakan elemen penting yang menentukan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana komunikasi utama antara perusahaan dan pihak eksternal seperti

investor, kreditor, otoritas regulasi, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, pemilihan prinsip penilaian memiliki dampak yang signifikan terhadap relevansi, keandalan, dan komparabilitas informasi akuntansi.

Ada dua metode yang umum digunakan untuk mengevaluasi produk yaitu metode biaya akuisisi (*historical cost*) dan metode nilai pasar (*fair value*). Metode biaya perolehan telah menjadi populer seiring waktu karena sifatnya yang objektif, mudah dipahami, dan dapat dilacak. Dalam pendekatan ini, aset dan kewajiban dicatat berdasarkan biaya yang dikeluarkan saat transaksi awal, menghasilkan laporan keuangan yang stabil dan konsisten. Namun, kelemahan utama dari metode ini adalah kurangnya relevansi informasi ketika nilai pasar aset atau kewajiban mengalami perubahan yang signifikan. Nilai yang tercantum dalam laporan keuangan bisa jadi sudah usang dan tidak mencerminkan situasi ekonomi perusahaan saat ini.

Di sisi lain, *fair value* tampaknya menjadi pilihan yang lebih tepat karena mencerminkan nilai pasar saat ini. Dalam standar akuntansi internasional, khususnya IFRS 13 (PSAK 68 di Indonesia), nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayarkan untuk melunasi suatu kewajiban dalam transaksi pasar saat ini. Oleh karena itu, nilai wajar dianggap lebih tepat untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan dan masa depan ekonomi suatu perusahaan. Namun, nilai wajar juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti fluktuasi dalam laporan keuangan, tingkat subjektivitas yang tinggi di pasar yang tidak aktif, dan biaya penerapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya historis.

Berdasarkan penjelasan ini, penelitian untuk mengevaluasi metode akuntansi dan penilaian memiliki peran yang sangat penting. Pemahaman yang mendalam tentang kelebihan, kelemahan, dan masalah yang timbul dalam penerapan biaya perolehan dan nilai wajar membantu pembuat laporan keuangan, auditor, otoritas pengawas, dan pengguna laporan keuangan dalam menilai kualitas informasi yang disajikan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis kedua metode penilaian tersebut,

membandingkan dampaknya, dan mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapannya dalam akuntansi modern.

II. TINJAUAN TEORI

1. Konsep Dasar Pengukuran dalam Akuntansi

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (IASB, 2018), pengukuran merujuk pada langkah untuk menetapkan nilai uang pada saat pengakuan yang pertama kali serta setelahnya untuk aset, utang, ekuitas, pemasukan, dan pengeluaran. Pengukuran juga dapat disebut dengan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi (Farha, 2023). Dengan demikian, pengukuran berfungsi sebagai metode untuk mengevaluasi nilai yang seharusnya dicatat dalam laporan keuangan.

Tujuan utama pengukuran adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Dalam akuntansi, terdapat beberapa dasar penilaian, seperti biaya historis, nilai saat ini, nilai realisasi bersih, biaya penggantian, dan nilai wajar. Biaya historis dianggap lebih andal karena didasarkan pada transaksi yang telah dilakukan, meskipun tidak selalu mencerminkan situasi ekonomi saat ini. Nilai wajar, di sisi lain, dianggap lebih relevan karena mencerminkan harga pasar saat ini, tetapi sering kali dapat menyebabkan fluktuasi dan memerlukan estimasi subjektif ketika pasar tidak aktif. Oleh karena itu, standar akuntansi saat ini menerapkan model penilaian campuran, yang menggabungkan biaya historis dan nilai wajar berdasarkan karakteristik setiap elemen laporan keuangan. Keputusan ini mencerminkan kompromi antara kebutuhan akan relevansi informasi dan keandalan data, sekaligus menunjukkan bahwa penilaian dalam akuntansi adalah elemen konseptual dan praktis yang terus berkembang seiring dengan perubahan pasar dan kebutuhan informasi keuangan.

2. Kebijakan Pengukuran dalam Akuntansi

Kebijakan pengukuran dalam dunia akuntansi adalah pilihan metode yang ditentukan oleh entitas untuk mengevaluasi dan menyajikan aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran di laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan PSAK dan IFRS, pemilihan kebijakan pengukuran harus mempertimbangkan aspek relevansi, keandalan, dan kebutuhan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Dalam praktik, entitas memiliki opsi untuk memilih berbagai dasar pengukuran, seperti biaya yang terjadi di masa lalu, nilai pasar, nilai saat ini, biaya penggantian, atau nilai realisasi bersih, tergantung pada sifat dan karakteristik transaksi yang dicatat.

Pemilihan metode pengukuran ini harus dilakukan secara konsisten agar laporan keuangan dapat dibandingkan dari periode ke periode. Selain itu, manajemen diwajibkan untuk mengungkapkan dasar pengukuran yang digunakan melalui catatan pada laporan keuangan untuk memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Saat ini, standar akuntansi internasional banyak mendorong penggunaan nilai pasar karena dianggap lebih relevan, meskipun biaya historis masih tetap digunakan untuk memastikan keandalan dan stabilitas laporan keuangan. Dengan demikian, kebijakan pengukuran dalam akuntansi mencerminkan keseimbangan antara teori akuntansi, kebutuhan praktis, serta kepatuhan terhadap standar yang ada.

III. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengukuran *Fair Value* dan *Historical Cost*

Secara tradisional, akuntansi mendasarkan diri pada prinsip biaya historis, di mana aset dan kewajiban dicatat berdasarkan harga perolehannya. Historical cost adalah nilai moneter suatu aset atau liabilitas pada saat transaksi awal (Maria, 2011). Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa aset dan liabilitas harus dicatat pada biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya, termasuk biaya

pembelian, pengiriman, pemasangan, dan biaya lain yang terkait langsung dengan perolehan aset (Pratiwi, 2018).

Kelebihan biaya historis terletak pada objektivitas yang didasarkan pada transaksi aktual dan didukung oleh bukti dokumentasi, sehingga dianggap lebih objektif dan verifiable, selain itu biaya historis juga menekankan pada reliabilitas yaitu relatif mudah untuk diverifikasi dan diaudit, karena didasarkan pada data historis yang tersedia. Biaya historis cenderung lebih konservatif dibandingkan fair value, karena tidak mengakui potensi keuntungan yang belum direalisasi.

Disamping itu kekurangan biaya historis mungkin tidak relevan dalam mencerminkan nilai pasar aset saat ini, terutama dalam kondisi pasar yang dinamis dan inflasi, Biaya historis dapat mempersulit perbandingan antar entitas, karena aset yang serupa dapat dicatat pada biaya yang berbeda tergantung pada waktu perolehan dan dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan, karena aset yang undervalued dapat mengurangi profitabilitas dan nilai aset bersih entitas.

Fair value adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran (Suwardjono, 2014; Perdana, 2014). Fair value berusaha untuk mencerminkan nilai pasar saat ini, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi pasar, risiko kredit, dan ekspektasi arus kas masa depan.

Kelebihan fair value dianggap lebih relevan dibandingkan historical cost, karena mencerminkan nilai pasar aset saat ini, yang dapat memberikan informasi yang lebih berguna bagi investor dan kreditor. Fair value dapat memberikan representasi yang lebih akurat mengenai nilai ekonomi aset dan liabilitas, terutama dalam kondisi pasar yang dinamis serta dapat meningkatkan transparansi laporan

keuangan, karena mengungkapkan nilai pasar aset dan liabilitas yang mungkin tidak tercermin dalam historical cost.

Kekurangannya terletak pada pengukuran yang seringkali melibatkan estimasi dan asumsi yang subjektif, terutama untuk aset yang tidak memiliki pasar aktif. Fair value dapat kurang reliable dibandingkan historical cost, karena didasarkan pada estimasi dan asumsi yang mungkin sulit untuk diverifikasi dan diaudit. Penerapan fair value dapat menyebabkan volatilitas yang signifikan dalam laporan keuangan, karena nilai aset dan liabilitas dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar. Serta membuka celah untuk manipulasi laporan keuangan, karena entitas dapat cenderung meningkatkan nilai aset dan pendapatan atau menurunkan nilai liabilitas dan biaya (Nugrahani, 2014).

B. Kontroversi dan Tantangan

1. Relevansi dan Realitas Ekonomi

Salah satu argumen utama yang mendukung penggunaan fair value adalah relevansinya dalam mencerminkan realitas ekonomi yang terjadi (Nugrahani, 2014; Tkachuk, 2019). Historical cost, yang didasarkan pada biaya perolehan aset pada saat transaksi awal, dianggap kurang mampu memberikan informasi yang up-to-date dan sesuai dengan kondisi pasar yang dinamis.

“Penilaian yang mendasarkan diri pada historical cost telah banyak kehilangan relevansinya dalam mengukur realitas ekonomi, karena historical cost hanya mengukur transaksi yang sudah selesai, tidak bisa mengakui perubahan nilai riil yang terjadi” (Nugrahani, 2014).

Dalam konteks ini, fair value dianggap lebih unggul karena berusaha untuk mencerminkan nilai pasar aset pada tanggal pelaporan, yang dapat memberikan informasi yang

lebih berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan (Cascini & DelFavero, 2011).

“Akuntansi fair value dapat meningkatkan transparansi atas informasi yang disampaikan kepada publik. Informasi fair value adalah informasi utama dalam keadaan ekonomi saat ini. Fair value akan memberikan informasi yang lebih riil bagi investor” (Epstein & Jermakowicz, 2010 dikutip dalam Nugrahani, 2014).

2. Subjektivitas dan Potensi Fraud

Meskipun fair value menawarkan keunggulan dalam hal relevansi, penerapannya juga menimbulkan tantangan signifikan, terutama terkait dengan subjektivitas dan potensi fraud (Krumwiede, 2008; Tkachuk, 2019). Pengukuran fair value seringkali melibatkan estimasi dan asumsi yang kompleks, terutama untuk aset yang tidak memiliki pasar aktif atau harga pasar yang readily observable.

“Meskipun bermaksud baik namun perkiraan manajemen tentang fair value bisa menjadi salah karena berbasis prediksi dan asumsi yang salah. Sikap Oportunistik dan ketidakjujuran manajemen dapat mengambil keuntungan dari penilaian dan estimasi yang digunakan dalam proses manipulasi dan memainkan angka untuk mencapai angka pendapatan yang diinginkan” (Krumwiede, 2008 dikutip dalam Nugrahani, 2014).

Dalam situasi seperti ini, terdapat risiko bahwa manajemen dapat memanipulasi estimasi fair value untuk meningkatkan nilai aset dan pendapatan, atau menurunkan nilai liabilitas dan biaya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan (Cascini & DelFavero, 2011).

“Berbagai kemungkinan lain dapat terjadi dalam pengukuran nilai wajar. Hal ini dikarenakan nilai wajar tidak

berdasarkan pada bukti historis, namun didasarkan pada seberapa bernilainya aset (liabilitas) pada saat pelaporan. Tidak adanya bukti historis ini (kecuali untuk pendekatan pasar yang observable), merupakan suatu celah untuk dilakukannya fraud. Entitas biasanya cenderung untuk meningkatkan nilai aset dan pendapatannya atau menurunkan nilai liabilitas dan biayanya” (Nugrahani, 2014).

Untuk mengatasi tantangan ini, standar akuntansi seperti SFAS 157 dan IFRS 13 memberikan panduan mengenai hierarki input yang digunakan dalam pengukuran fair value, dengan memberikan preferensi pada data pasar yang observable dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi (Tkachuk, 2019). Namun, implementasi panduan ini tetap memerlukan pertimbangan dan kehati-hatian yang signifikan.

3. Volatilitas dan Dampak terhadap Laporan Keuangan

Penerapan fair value juga dapat menyebabkan volatilitas yang signifikan dalam laporan keuangan, karena nilai aset dan liabilitas dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar yang dinamis (Warsidi, 2010; Cascini & DelFavero, 2011). Volatilitas ini dapat mempersulit para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi kinerja dan posisi keuangan suatu entitas, serta dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap risiko investasi.

“Banyak pihak, utamanya lembaga-lembaga keuangan mengkhawatirkan akuntansi yang berdasarkan harga pasar akan menyebabkan Volatility kinerja lembaga karena semakin mudahnya berfluktuatif nilai item-item aktiva maupun liabilitas” (Warsidi, 2010 dikutip dalam Nugrahani, 2014).

Selain itu, penerapan fair value terhadap liabilitas juga dapat menghasilkan hasil yang kontra-intuitif, di mana penurunan nilai liabilitas akibat peningkatan risiko kredit dapat meningkatkan laba entitas (Cascini & DelFavero, 2011). Hal ini dapat menyesatkan para investor dan kreditor, karena peningkatan laba tersebut tidak mencerminkan peningkatan kinerja operasional atau prospek keuangan entitas.

C. Upaya untuk Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan penerapan fair value, berbagai upaya telah dilakukan oleh para penyusun standar dan regulator, termasuk:

a) **Peningkatan Panduan**

Penerbitan standar yang lebih rinci dan komprehensif mengenai pengukuran fair value, seperti SFAS 157 dan IFRS 13 (Tkachuk, 2019).

b) **Pengawasan yang Lebih Ketat**

Peningkatan pengawasan terhadap praktik akuntansi dan audit, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap fraud dan manipulasi laporan keuangan (Fahnestock & Bostwick, 2011).

c) **Pengembangan Keahlian**

Peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi para akuntan dan auditor, untuk memastikan bahwa mereka memiliki keahlian yang memadai dalam melakukan estimasi dan penilaian fair value yang kompleks.

Namun, upaya-upaya ini tidak sepenuhnya menghilangkan tantangan yang terkait dengan penerapan fair value. Subjektivitas, potensi fraud, dan volatilitas tetap menjadi isu-isu yang perlu dipertimbangkan dengan cermat dalam pemilihan kebijakan pengukuran yang tepat.

IV. KESIMPULAN

Penilaian dalam akuntansi memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dan transparan kepada para pengguna laporan keuangan. Dua metode utama yang digunakan dalam pengukuran nilai aset dan kewajiban adalah biaya historis dan nilai wajar. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan, auditor, serta pihak-pihak terkait dalam mengambil keputusan.

Metode biaya historis memberikan keandalan yang tinggi karena didasarkan pada transaksi yang telah terjadi dan dapat diverifikasi. Namun, metode ini seringkali dianggap kurang relevan dalam menggambarkan situasi ekonomi terkini, terutama dalam kondisi pasar yang dinamis atau saat inflasi tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan distorsi dalam laporan keuangan dan membatasi kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan antar entitas.

Sebaliknya, nilai wajar mencerminkan kondisi pasar saat ini dan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai nilai ekonomi suatu perusahaan. Nilai wajar dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan dan memberikan informasi yang lebih berguna bagi investor serta kreditor. Meskipun demikian, penerapan metode ini menghadapi tantangan signifikan, seperti subjektivitas dalam estimasi nilai, volatilitas yang tinggi dalam laporan keuangan, serta potensi fraud dan manipulasi oleh manajemen.

Kebijakan pengukuran dalam akuntansi haruslah didasarkan pada pertimbangan keseimbangan antara relevansi dan keandalan informasi. Standar akuntansi modern, seperti IFRS 13, cenderung mendorong penggunaan nilai wajar untuk memberikan informasi yang lebih relevan, meskipun biaya historis tetap digunakan untuk memastikan kestabilan dan keandalan laporan keuangan.

Untuk mengatasi tantangan dalam penerapan nilai wajar, berbagai upaya telah dilakukan, seperti peningkatan panduan standar, pengawasan yang lebih ketat, dan pengembangan keahlian profesional akuntansi. Meskipun demikian, tantangan-tantangan tersebut masih tetap ada dan perlu diatasi dengan kehati-hatian dan transparansi dalam praktik akuntansi. Secara keseluruhan, pilihan antara biaya historis dan nilai wajar tidak dapat diputuskan secara mutlak, melainkan perlu disesuaikan dengan karakteristik transaksi, kondisi pasar, serta tujuan informasi keuangan yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Cascini, K.T. & DelFavero, A. (2011). Evaluasi penerapan akuntansi nilai wajar: Dampak pada pelaporan keuangan. *Jurnal Penelitian Bisnis & Ekonomi*, 9(1), 1-16.
- Epstein, B.J. & Jermakowicz, E.K. (2010). *Wiley IFRS: Interpretation and Application of International Financial Reporting Standards*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Fahnestock, R.T. & Bostwick, E.D. (2011). An Analysis Of The Fair Value Controversy, *Proceedings of ASBBS*, 18(1).
- Krumwiede, T. (2008). *Strategic Finance: Why Historical Cost Accounting Make Sense?* CPA.
- Nobes, C. (2001). *Asset Measurement Bases in UK and IASC Standards*. London: Certified Accountants Educational Trust.
- Nugrahani, C. (2014). Fair Value dan Potensi Fraud. *Kiat Bisnis*, 5(5), 325-333.
- Tkachuk, N.V. (2019). Biaya Historis dan Nilai Wajar: Keuntungan, Kerugian, dan Penerapan. *Jurnal Penelitian Sejarah, Budaya, dan Seni*, 8(1), 173-182.
- Warsidi (2010). *Kelemahan dari fair value*. Jakarta